



Pemberdayaan Warga Melalui Program Rumah Layak Huni Untuk Tingkatkan Kualitas Hidup di Desa Marga Mulya

Muhammad Diva Mu'zizat^{1*}, Wa Ode Asmawati²

¹⁻²Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan 15419

Korespondensi Penulis : divamuizatz28@gmail.com*

Abstract. *This study investigates the impact of Habitat for Humanity Indonesia's Decent Housing Program on improving the quality of life of poor residents in Marga Mulya Village. The research aims to evaluate the role of community empowerment through the program in increasing access to decent housing, as well as to assess its broader impacts on education, health, and the economic conditions of the beneficiaries. Using a qualitative research method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews with program participants and key stakeholders. The findings show that the Decent Housing Program has significantly improved access to adequate and safe housing for the poor. In the field of education, improved housing conditions have created a more conducive environment for children to study, leading to greater learning motivation and better academic achievements. In terms of health, better sanitation facilities and healthier living environments have reduced the risk of infectious diseases and contributed to the residents' overall physical and mental well-being. Economically, access to stable and decent housing has reduced household expenditures on home repairs, allowing families to allocate more resources toward productive economic activities. However, the study also identified several challenges that need to be addressed to further enhance program effectiveness. These challenges include the location of housing projects that are difficult to access, which affects residents' mobility and access to public services, and issues related to the quality of construction that require continuous monitoring and improvement. Overall, the study highlights the positive contribution of the Decent Housing Program while providing recommendations for its future development.*

Keywords: Behavior; General Election; Voters

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak Program Perumahan Layak dari Habitat for Humanity Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin di Desa Marga Mulya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemberdayaan masyarakat melalui program ini dalam meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak, serta menilai dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi para penerima manfaat. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan peserta program dan pihak terkait lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Perumahan Layak ini secara signifikan telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap hunian yang memadai dan aman. Dalam bidang pendidikan, kondisi rumah yang lebih baik menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi anak-anak untuk belajar, sehingga meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik mereka. Dalam bidang kesehatan, fasilitas sanitasi yang lebih baik dan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat mengurangi risiko penyakit menular dan berkontribusi terhadap kesejahteraan fisik dan mental penduduk. Secara ekonomi, akses terhadap perumahan yang stabil dan layak mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk perbaikan rumah, sehingga memungkinkan keluarga untuk lebih fokus pada kegiatan ekonomi produktif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program, seperti lokasi proyek perumahan yang sulit dijangkau, yang mempengaruhi mobilitas dan akses warga terhadap layanan publik, serta masalah kualitas konstruksi yang membutuhkan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti kontribusi positif Program Perumahan Layak serta memberikan rekomendasi untuk pengembangannya di masa depan.

Kata kunci: Kualitas Hidup; Pemberdayaan Masyarakat Miskin; Rumah Layak Huni

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022 tercatat bahwa sekitar 9,54% dari total populasi Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, yang setara dengan lebih dari 26 juta jiwa. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persoalan kemiskinan tetap meluas, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan kawasan perkotaan yang terpinggirkan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber penghasilan, tetapi juga mencakup akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan yang layak huni.

Ketimpangan geografis merupakan salah satu determinan signifikan yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan. Wilayah pedesaan secara konsisten menunjukkan angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan, sebagaimana diindikasikan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan secara substansial melebihi angka di kawasan perkotaan. Fenomena ini mencerminkan adanya disparitas dalam akses terhadap kualitas hidup yang layak. Konsekuensinya, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil cenderung terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diputuskan.

Oleh karena itu, kolaborasi yang nyata, terarah, dan berkelanjutan antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta menjadi hal yang penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan di Indonesia. Peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, serta penyediaan infrastruktur perumahan yang memadai merupakan komponen strategis dalam agenda pemberantasan kemiskinan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan memperluas peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah melalui program perbaikan rumah dan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketersediaan rumah dan lingkungan permukiman yang memadai merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia dan berperan penting dalam menentukan kualitas hidup individu. Kualitas hidup sendiri merupakan indikator krusial dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Dalam konteks ini, kondisi perumahan menjadi salah satu determinan utama yang secara signifikan memengaruhi tingkat kualitas hidup penduduk.

Rumah yang layak tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan yang aman, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup, termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan stabilitas ekonomi keluarga. Kondisi perumahan yang tidak memadai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan kesehatan, seperti meningkatnya prevalensi penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis, rendahnya capaian akademik anak-anak akibat suasana belajar yang tidak mendukung, serta ketidakstabilan ekonomi keluarga akibat beban biaya perbaikan rumah yang terus meningkat. Selain itu, lingkungan perumahan yang tidak layak sering kali berkorelasi dengan gangguan psikologis, seperti stres dan depresi, yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas serta kesejahteraan secara menyeluruh bagi para penghuninya.

Program penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa 'setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.' Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga negara, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan. Namun demikian, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 15 Juni 2023 mencatat bahwa terdapat sebanyak 3.654.400 unit rumah tidak layak huni di Indonesia. Angka ini mencerminkan bahwa masih terdapat sejumlah besar masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak, yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut dari pemerintah.

Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan signifikan terkait ketersediaan rumah layak huni. Hal ini tidak terlepas dari jumlah populasi manusia di Kabupaten Tangerang menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang telah melampaui 3,8 juta jiwa. Pertumbuhan populasi ini sebagian besar disebabkan oleh arus migrasi dari wilayah lain, mengingat kawasan industri yang berkembang pesat serta kedekatan geografis dengan pusat ibu kota. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan perumahan, munculnya kawasan permukiman kumuh, serta bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni.

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, sejumlah program bantuan telah dilaksanakan di berbagai kecamatan di Kabupaten Tangerang. Salah satu program unggulan yang diinisiasi adalah Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin, dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi (GEBRAK PAKUMIS PLUS). Program ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan, yang selanjutnya diformalkan melalui Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS.

Selain peran pemerintah, berbagai program bantuan dari sektor non-pemerintah ikut serta dalam memberikan kontribusinya untuk mengatasi permasalahan permukiman di Kabupaten Tangerang. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pemberdayaan masyarakat, di mana tanggung jawab tidak hanya berada pada pemerintah, melainkan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Di tengah kompleksitas isu terkait ketersediaan hunian layak, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berupaya memberikan solusi nyata dengan menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu LSM yang aktif dalam hal ini adalah *Habitat for Humanity Indonesia*, yang secara konsisten melaksanakan program-program pembangunan rumah bagi warga miskin sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagi *Habitat for Humanity Indonesia*, rumah tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai fondasi utama kehidupan keluarga serta instrumen strategis dalam pembangunan bangsa. Keberadaan rumah yang layak juga memiliki korelasi yang kuat terhadap peningkatan aspek kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penyediaan hunian yang memadai dipandang sebagai salah satu pendekatan paling efektif dalam menurunkan indikator kemiskinan di Indonesia.

Habitat for Humanity Indonesia menjalankan program pembangunan hunian layak di Kecamatan Mauk, khususnya di wilayah utara yang mencakup Desa Marga Mulya. Berdasarkan data yang dilansir dari *Katadata.id*, merujuk pada statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, tercatat bahwa di wilayah tersebut terdapat sebanyak 1.385 unit rumah tidak layak huni, dibandingkan dengan hanya 596 unit rumah yang memenuhi standar kelayakan. Tingginya angka rumah tidak layak huni di Desa Marga Mulya dapat dikaitkan dengan kondisi geografisnya yang berdekatan dengan garis pantai, sehingga hunian di kawasan tersebut cenderung rentan terhadap risiko bencana alam. Selain itu, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor-sektor dengan tingkat kestabilan ekonomi yang rendah, seperti pekerjaan musiman, industri manufaktur, serta sektor perikanan, yang turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menyediakan hunian yang layak.

Tingkat perekonomian masyarakat di Desa Marga Mulya masih tergolong rendah. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, rata-rata pendapatan harian buruh laki-laki di wilayah tersebut berkisar pada angka Rp50.000 per hari kerja penuh, sementara buruh perempuan memperoleh sekitar Rp30.000 per hari. Kondisi ini diperburuk oleh sifat pekerjaan yang cenderung musiman, sehingga menyebabkan ketidakstabilan pendapatan rumah tangga. Situasi ekonomi tersebut menjadikan masyarakat setempat mengalami kesulitan dalam memprioritaskan alokasi dana atau tabungan untuk pembangunan rumah yang layak. Padahal, tinggal di hunian yang memenuhi standar kelayakan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan, baik dari segi kesehatan, stabilitas sosial, maupun ekonomi keluarga.

Pelaksanaan program 'Rumah Layak Huni' yang diinisiasi oleh *Habitat for Humanity Indonesia* memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Program ini menjadi topik yang relevan untuk dikaji lebih lanjut karena potensinya sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan perumahan yang masih dihadapi masyarakat. Berdasarkan urgensi tersebut, diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi program yang dijalankan oleh lembaga filantropi seperti *Habitat for Humanity Indonesia*. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul penelitian: “PEMBERDAYAAN WARGA MELALUI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI UNTUK TINGKATKAN KUALITAS HIDUP DI DESA MARGA MULYA”.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Kemiskinan di Indonesia tengah sulit untuk dikurangi, hal ini penyebabnya adalah factor produksi yang kurang memadai, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses yang berkualitas, kurangnya pendidikan di pedesaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah masih tidak serasi oleh kemampuan yang dimiliki masyarakat (Sunarto : 2010). Oleh karena itu perlu adanya inovasi dari negara maupun masyarakat unruk pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan ini.

Salah satu Langkah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan berawal dari kata “Daya” kemudian menjadi kata “berdaya” karena diawali kata ber- maka berarti kemampuan atau kekuatan melakukan sesuatu. Kata “berdaya” yang diberi awalan pe- dan sisipan –m- serta akhiran –an manjadi

“pemberdayaan” yang memiliki arti membuat sesuatu menjadi berdaya dan memiliki kekuatan (Risyanti, 2006).

Pemberdayaan menurut Zubaedi dalam (Ferdiansyah : 2021) adalah usaha untuk mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi yang mereka miliki agar menjadi tindakan yang nyata. Kartasmita pada (Febriansyah : 2021) juga menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan cara untuk keluar dari kemiskinan. Menurut Mardikanto (2013) pemberdayaan merupakan cara untuk memperkuat masyarakat yang kurang mampu agar terlepas dari kemiskinan, dengan kata lain pemberdayaan dapat memandirikan masyarakat (Mardikanto, 2013). Tujuan dari pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan terutama untuk kelompok masyarakat kecil yang tidak berdaya (Suharto, 2009).

Partisipasi Masyarakat

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Sedangkan di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia et all 2015 : 196) dalam (Safitri : 2022).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merujuk pada tindakan ikut serta dalam suatu kegiatan. Lebih lanjut, partisipasi juga diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial, di luar profesi atau pekerjaan yang mereka jalani.

Kualitas Hidup

WHO pada tahun 1947 dalam (Adiyanti : 2010) mulai memperkenalkan istilah kualitas hidup dalam konteks definisi tentang sehat, yaitu suatu kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial individu terbebas dari berbagai kelemahan dan penyakit.

Frank-Stormberg (1988) dalam (Afiyanti: 2010) mendefinisikan kualitas hidup individu secara murni dengan mengukur melalui ukuran indikator obyektif dari pendapatan, pekerjaan, edukasi, dan fungsi fisik individu. Campbell (1976) dalam (Afiyanti 2010)

menggunakan indikator lain, yaitu indikator sosial, dalam memberi definisi tentang kualitas hidup. Campbell menjelaskan bahwa kualitas hidup individu merupakan suatu kondisi kehidupan seseorang yang mempengaruhi kualitas hidupnya namun kondisi tersebut tidak menentukan pengalaman aktual dari seluruh kehidupannya. Di sisi lain, Pearlman dan Uhlmann (1988) dalam (Afiyanti : 2010) menjelaskan definisi kualitas hidup dari indikator subyektif individu, yaitu persepsi seorang individu terhadap perasaan kesejahteraannya secara subyektif.

Dari gagasan tersebut maka ada tiga aspek penting dalam mencapai kapabilitas hidup yang di gagas oleh Amartya Sen(2009) yaitu pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Hal ini selaras dengan definisi oleh para ahli dan WHO.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Miza Nina Adlini, dkk (2022) yang mengartikan bahwa Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi.

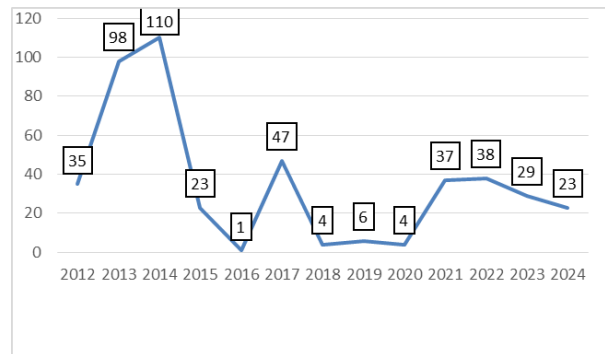
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni Melalui Proses Pemberdayaan Berbasis Rumah Layak Huni

Habitat for Humanity Indonesia telah beroperasi di Desa Marga Mulya selama 12 tahun dan berhasil membangun 455 rumah dari total 756 rumah tidak layak huni, atau sekitar 73%. Program ini mengacu pada standar rumah layak huni yang ditetapkan oleh Program NAHP Kementerian PUPR yang mencakup empat kriteria: ketahanan bangunan, kecukupan luas, sanitasi layak, dan akses air minum bersih. Berdasarkan observasi dan pernyataan informan, rumah-rumah yang dibangun telah memenuhi kriteria tersebut dan layak dihuni. *Habitat for Humanity Indonesia* melaksanakan programnya melalui delapan tahapan sistematis, yaitu: (1) survei dan asesmen awal, (2) sosialisasi program serta identifikasi kebutuhan masyarakat, (3) pembentukan komite pembangunan dan penajaman program, (4) seleksi keluarga penerima dengan rekomendasi dari komite, (5) uji publik bagi program non-pinjaman, (6) finalisasi daftar penerima bantuan, (7) penyusunan kontrak sosial bersama kelompok masyarakat, dan

(8) pelaksanaan pembangunan hunian.

Tabel 1. Diagram Rumah Terbantu 12 Tahun Terakhir



Sumber: Habitat For Humanity Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa grafik setiap tahunnya selalu berubah-ubah dan bahkan pada tahun 2016 hanya terdapat 1 rumah yang merasakan manfaat dari program ini. Hal ini dikarenakan program habitat perlu sumbangsih donator yang sesuai. Hal ini diafirmasi oleh Kepala Lembaga *Habitat For Humanity Indonesia* (HS).

Secara keseluruhan, pencapaian program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh *Habitat for Humanity Indonesia* di Desa Marga Mulya menunjukkan hasil yang signifikan, dengan total 455 unit rumah yang telah berhasil direhabilitasi atau dibangun. Jumlah ini merepresentasikan pencapaian yang cukup memuaskan jika dibandingkan dengan total kebutuhan, yakni sebanyak 751 unit rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.

Mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh *National Affordable Housing Program* (NAHP) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rumah layak huni dikategorikan berdasarkan empat kriteria utama: (1) ketahanan dan keamanan struktur bangunan—dengan penggunaan material yang sesuai standar seperti bata atau batako berkualitas; (2) kecukupan luas hunian yang proporsional dengan jumlah penghuni; (3) ketersediaan sistem sanitasi yang layak; serta (4) akses terhadap sumber air minum yang aman. *Habitat for Humanity Indonesia* berupaya untuk membangun rumah-rumah tersebut sesuai dengan standar kelayakan yang telah ditetapkan tersebut.

Dampak Program Terhadap Aspek Kualitas Seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat diketahui bahwa program ini mendatangkan manfaat yang baik berupa:

1. Pendidikan

Secara umum, program Rumah Layak Huni memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendidikan anak-anak di Desa Marga Mulya. Lingkungan tempat tinggal yang lebih layak menciptakan ruang belajar yang kondusif dan mendorong peningkatan prestasi akademik. Temuan ini sejalan dengan teori kapabilitas Amartya Sen, yang menekankan bahwa lingkungan yang mendukung merupakan faktor penting dalam mewujudkan fungsi-fungsi bernilai dalam kehidupan, termasuk pendidikan.

2. **Kesehatan**

Program Rumah Layak Huni yang dilaksanakan di Desa Marga Mulya terbukti membawa dampak positif yang signifikan terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Hunian yang lebih layak, dengan struktur bangunan yang aman serta dilengkapi fasilitas dasar seperti ventilasi yang memadai, sanitasi yang bersih, dan akses terhadap air bersih, secara langsung berkontribusi terhadap menurunnya risiko penyakit menular, seperti infeksi saluran pernapasan dan diare. Selain dampak fisik, kondisi lingkungan rumah yang lebih sehat juga mendukung stabilitas psikologis penghuni, mengurangi tingkat stres dan kecemasan yang sering kali muncul akibat kondisi hunian yang tidak memadai. Temuan ini selaras dengan teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen, yang menekankan bahwa kualitas lingkungan tempat tinggal merupakan faktor esensial dalam meningkatkan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan bermartabat, termasuk dalam aspek kesehatan.

3. **Ekonomi**

Perbaikan kualitas tempat tinggal tidak hanya meningkatkan rasa aman dan kenyamanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga, seperti pemanfaatan rumah sebagai ruang produktif atau usaha rumahan.

Dengan berkurangnya beban biaya perbaikan rumah dan meningkatnya kualitas lingkungan, masyarakat memiliki ruang lebih untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa pemberdayaan berbasis perbaikan infrastruktur perumahan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Program penyediaan rumah layak huni memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan serta efisiensi pengeluaran bagi keluarga penerima manfaat. Kehadiran hunian yang kokoh dan aman tidak hanya memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis, tetapi juga memungkinkan anggota keluarga untuk bekerja secara lebih fokus dan produktif, termasuk menjalankan kegiatan ekonomi berskala kecil dari rumah. Selain itu, dana yang sebelumnya

dialokasikan untuk perbaikan atau pemeliharaan rumah dapat dialihkan ke sektor lain yang bersifat investasi jangka panjang, seperti pendidikan anak maupun layanan kesehatan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Keberlanjutan Program

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat diketahui beberapa faktor pendukung dan juga penghambat atas pelaksanaan program rumah layak huni ini yang diantaranya adalah adanya keterlibatan dan dukungan masyarakat lokal. Adanya keterlibatan aktif masyarakat terutama tokoh masyarakat ataupun perangkat desa yang dilakukan oleh Jaro Subur (JS) dan Surianda (SR) sangat penting dalam memfasilitasi koordinasi dan pelaksanaan program. Dukungan ini mencakup pemberian informasi, mobilisasi sumber daya, dan penyelesaian masalah yang muncul selama proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat juga menciptakan rasa memiliki terhadap program, yang meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka dalam pemeliharaan rumah setelah pembangunan selesai.

Selanjutnya program pelatihan dan edukasi dalam inisiatif Rumah Layak Huni berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga dalam merawat dan memperbaiki rumah. Edukasi mengenai perawatan hunian dan pengelolaan keuangan juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjaga kondisi rumah serta mengelola fasilitas secara mandiri dan berkelanjutan. Ketersediaan material berkualitas dan penerapan teknologi konstruksi yang tepat menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan program. Penggunaan bahan yang tahan lama dan efisien membantu meminimalkan biaya perawatan, serta memastikan proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan signifikan.

Kemudian terdapat faktor penghambat yang dialami diantaranya adalah Lokasi rumah yang jauh dari jalan utama menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan. Jarak yang jauh mengakibatkan waktu dan biaya tambahan untuk pengiriman material, serta meningkatkan risiko kerusakan material. Kendala aksesibilitas ini dapat memperlambat proses pembangunan dan berdampak pada kualitas hasil akhir rumah.

Terdapat beberapa individu atau kelompok di masyarakat menunjukkan kurangnya kerja sama, seperti mengajukan permintaan yang tidak sesuai atau memanfaatkan situasi. Ketidakkoooperatifan ini dapat menimbulkan konflik dan memperlambat pelaksanaan program. Selain itu, persepsi bahwa bantuan lebih sering diberikan kepada keluarga staf lokal dapat memicu kecemburuan sosial dan memengaruhi keharmonisan komunitas.

Masalah kualitas pembangunan juga menjadi kendala, dengan laporan mengenai

proyek yang terburu-buru dan tidak maksimal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat tentang penggunaan fasilitas seperti MCK turut menambah ketidakpuasan. Ketidakpuasan terhadap kualitas dan durasi pengerjaan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program dan mengancam keberlanjutannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberhasilan Program dalam Meningkatkan Akses Perumahan: Program ini secara efektif meningkatkan akses warga miskin di Desa Marga Mulya terhadap perumahan yang layak. Dengan perbaikan atau pembangunan rumah yang lebih baik, warga mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Program ini berhasil mengatasi masalah perumahan yang tidak layak dan memberikan solusi yang signifikan bagi masyarakat miskin.
2. Melalui program rumah layak huni ini dapat menciptakan lingkungan hidup yang kondusif bagi orang-orang yang ingin belajar sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi anak-anak. Kemudian dengan adanya rumah layak huni maka semua masyarakat mendapatkan akses fasilitas sanitasi yang lebih baik sehingga mendapatkan jaminan kesehatan yang lebih baik. Selain hal tersebut, Program ini memberikan dampak positif pada ekonomi keluarga dengan menyediakan tempat tinggal yang stabil untuk menjalankan usaha, mengurangi pengeluaran untuk perbaikan rumah, dan meningkatkan kapasitas ekonomi warga
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini yang diantaranya adalah keterlibatan aktif masyarakat, program pelatihan dan edukasi, hingga ketersediaan material yang menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan program ini. Namun perlu diperhatikan juga faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini yang diantaranya adalah lokasi rumah yang sulit diakses, kurang adanya kerja sama dari beberapa individu, kualitas pembangunan dan ketidakpastian waktu pembangunan.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Afiyanti, Y. (2010). Analisis konsep kualitas hidup. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 13(2), 81–86.
- Agustin, W. A. (2017). Peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat pada program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (Studi kasus di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar) [Skripsi, tidak diterbitkan].
- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan kemandirian desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2).
- Andriani, M. (2018). Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(02), 107–124.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Indikator rumah layak huni 2019. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1242/sdgs_11/1
- Badan Pusat Statistik. (2021). Berita resmi statistik presentase penduduk miskin. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- Banerjee, A. V., Gertler, P. J., & Ghatak, M. (2002). Empowerment and efficiency: Tenancy reform in West Bengal. *Journal of Political Economy*, 110(2), 239–280. <https://doi.org/10.1086/338744>
- Dian, T. R., & Maruf, M. F. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tunai (Studi kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). *Publika*, 7(4).
- Eliadi, D. (2021). Implementasi program pembangunan rumah sederhana sehat (PRSS) di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 181–191.
- Febriansyah, G. B., Adi, M. A., & Moonti, M. V. (2021). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan nonformal di Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 3(2), 43–49.
- Hapsari, M. T. (2016). Pengaruh pembangunan perumahan bagi rumah tangga miskin (RTM) terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12(3), 315–324.
- Huni, R. T. L. (tanpa tahun). Efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Padang Lawas Utara [Skripsi, tidak diterbitkan].
- Ismi, A. (2021). Implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 76–83.
- KEPUSTAKAAN, D. (2014). Sugiyono, metode penelitian kombinasi (mixed methods),

Bandung: Alfabeta, 2013. *Jurnal JPM IAIN Antasari*, 1(2).

- Lisaini, L. (tanpa tahun). Efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Welfare State*, 2(1), 222000.
- Mardianta, A. V. (tanpa tahun). Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni bagi MBR di Provinsi Sumatera Utara [Skripsi, tidak diterbitkan].
- Muhtadi, M. M. (tanpa tahun). Pemberdayaan masyarakat melalui program bedah rumah tidak layak huni oleh BAZNAS. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 7(2), 28–51.
- Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). Pemberdayaan masyarakat. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Ngabito, N., & Raf, B. (2023). Implementasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. *Provider: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 76–93.
- Nurman, J. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir [Disertasi doktoral, Universitas Islam Riau].
- Risyanti, R. D. R., & Roesmidi, M. (2006). *Pemberdayaan masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Safitri, R. D. (2022). Tugas akhir analisis partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Studi kasus Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri) [Disertasi doktoral, Universitas Muhammadiyah Ponorogo].
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Sen, A. (1993). Capability and well-being. In M. Nussbaum & A. Sen (Eds.), *The quality of life* (pp. 270–293). Clarendon Press.
- Statistik, B. P., & Bappenas, U. N. F. P. A. (2005). *Proyeksi penduduk Indonesia 2000–2025*. Badan Pusat Statistik.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Sunaryo, & Hasan, P. A. R. (2024). *Konsep kualitas hidup dalam kerangka kapabilitas*. Kompas.
- Totok, M., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (pp. 114–115). Alfabeta.
- Tukiman, T., & Nawangsari, E. R. (2019). *Strategi pemberdayaan masyarakat desa*. CV Mitra Sumber Rejeki.